

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap kehidupan yang aman, bahagia, dan makmur ialah kehidupan yang diimpikan dan diharapkan oleh semua umat manusia. Namun, kesejahteraan tersebut tidak dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan syariah ialah menjunjung tinggi kesejahteraan manusia, yaitu dimana terletak pada memelihara keimanan (*al-din*), menjaga roh atau jiwa (*al-nafs*), memelihara harta atau kekayaan (*al-mal*), memelihara akal (*al-'aql*), dan menjaga kehormatan keluarga (*al-irdl*).¹ Didalam Islam memberikan ajaran untuk para umatnya agar mereka tidak serta merta meninggalkan suatu keturunan dengan kondisi yang buruk baik dari segi ekonomi, pertahanan, ilmu, bahkan agama sekalipun.

Agama Islam turun sebagai agama terakhir yang mempunyai tujuan untuk mengantarkan pemeluk agama Islam menuju pada suatu kebahagiaan hidup yang abadi, maka dari itu Islam amat mengindahkan kebahagiaan umat manusia baik pada kehidupan duniawi maupun *ukhrawi*, dengan kata lain bahwa Islam sangat berharap agar umat manusia dapat mendapatkan kehidupan yang sejahtera baik spiritual maupun material.

Strategi yang bisa dijalankan oleh suatu negara agar dapat memberikan peningkatan kesejahteraan pada rakyatnya ialah melaksanakan pembangunan, yakni pada ruang lingkup ekonomi, yang mana pertumbuhan ekonomi sebagai acuannya. Penyebab terjadinya kesejahteraan pada suatu negara yang dimunculkan oleh Adam Smith pada tahun 1776, yaitu dimana negara sangat mementingkan skala ekonomi dan kualitas SDM nya yang negara tersebut miliki.²

Pertumbuhan ekonomi yakni ialah salah satu indikator yang amat penting guna memberikan penilaian terhadap sebuah hasil

¹ Ivan Rahmat Santoso, "Konsep Marketing Berbasis Maqoshid Al-Syari'i Imam Al-Ghazali," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 03 (2019): 157–65, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.557>.

² Asepma Hygi Prihastuti, "Pengaruh Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Riau," *Menara Ekonomi* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.31869/me.v4i1.665>.

kinerja dalam perekonomian, yang utama untuk melaksanakan suatu analisis tentang hasil adanya pembangunan ekonomi yang telah dijalankan oleh setiap negara atau bahkan daerah sekalipun. Ketika pertumbuhan ekonomi pada setiap negara atau wilayah menunjukkan peningkatan yang signifikan, maka negara atau wilayah tersebut bisa dikatakan pertumbuhannya mempunyai perkembangan dengan baik. Kebalikannya yaitu, jika disuatu negara terdapat beban sosial yang semakin banyak, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan yang masih tinggi, persebaran pendapatan yang tidak merata diseluruh wilayah, serta adanya tingkat pengangguran yang kian meningkat, hal itu dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah atau negara tersebut belum berhasil.³

Negara Indonesia ialah suatu negara yang masih berkembang dengan mempunyai jumlah penduduk yang tinggi dan potensi-potensi yang sangat besar jika dilihat dari sudut pandang tenaga kerja. Sebagai negara yang mempunyai jumlah penduduk yang amat besar ini dapat menimbulkan tingginya permintaan terhadap barang dan jasa. Selain itu, perkembangan penduduk dapat memberikan dampak yang buruk jika produktivitas pada bidang produksi berada pada angka yang rendah maka akan menyebabkan pengangguran yang meningkat di negara tersebut.⁴

Pengangguran atau *unemployment* ialah suatu *problem* yang hampir ada pada suatu perekonomian baik di suatu negara maupun wilayah. Pada hakikatnya, pengangguran diartikan menjadi ketidakmampuan angkatan kerja (*labor force*) guna mendapatkan suatu pekerjaan dengan apa yang mereka butuhkan dan mereka harapkan. Pengangguran bukanlah yang selamanya sebanding dengan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan atau yang sedang dalam mencari suatu pekerjaan. Seseorang yang sudah mempunyai pekerjaan pun dapat dikelompokkan kedalam pengangguran, sebab

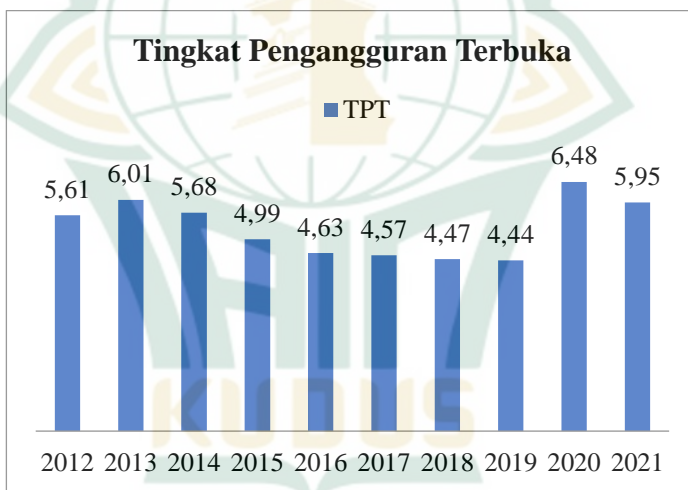
³ Dwi Mahroji dan Iin Nurkhasanah, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten," *Jurnal Ekonomi-Qu* 9, no. 1 (2019): 51–72, <http://dx.doi.org/10.35448/jequ.v9i1.5436>.

⁴ Riati Bakce, "Analisis Perkembangan Jumlah Penduduk Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Menara Ilmu* 14, no. 2 (2020): 139–49, <https://doi.org/10.31869/mi.v14i2.1752>.

konsep pengangguran bisa diamati dari tiga ukuran, yakni ialah waktu, produktivitas, dan intensitas pekerjaan.⁵

Berikut Gambar 1.1 fenomena TPT yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah periode 2017 sebesar 4,57 persen. Pada tahun 2018 angka TPT pada Provinsi Jawa Tengah telah terjadi penurunan menjadi sebesar 4,47 persen. Periode 2019 TPT pada Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,44 persen. Kemudian, periode 2020 TPT pada Provinsi Jawa Tengah telah terjadi kenaikan menjadi sebesar 6,48 persen. Sedangkan, di tahun 2021 TPT pada Provinsi Jawa Tengah telah terjadi penurunan menjadi sebesar 5,95 persen. berikut merupakan grafik TPT di Provinsi Jawa Tengah periode 2017 hingga 2021 dalam satuan persen.

Gambar 1.1 Grafik Angka Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2021 (Persen)



Sumber : Data BPS Jateng

Islam agama yang dirahmati oleh Allah SWT telah menjelaskan dengan jelas baik didalam al-Qur'an ataupun di al-Hadist yang dimana manusia dianjurkan untuk belajar, cerdas, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Terlebih Islam membandingkan bahwa bekerja

⁵ Suparmono, *Pengantar Ekonomika Makro Teori, Soal, Dan Penyelesaiannya*, ed. Ari Sudarman (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2004), 164.

adalah salah satu bentuk rasa bersyukur kepada sang Maha Pencipta, karena bekerja dalam Islam diukur sebagai suatu bentuk ibadah. Bekerja mempunyai arti bahwa orang tersebut telah mengembangkan dan menggunakan potensi SDA yang telah diberikan oleh sang *Khalik*. Kebalikannya, jika menganggur ialah orang tersebut telah menyia-nyiaikan apa yang telah Allah SWT berikan dan amanahkan kepada kita sebagai umat muslim di dunia.⁶

Berdasarkan data diatas, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah selalu mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, hal tersebut tentunya akan menjadikan persaingan oleh setiap individu untuk memperoleh pekerjaan semakin tinggi dengan tingkat angkatan kerja yang semakin tinggi pula. Sehingga memungkinkan terjadinya tingkat pengangguran di Jawa Tengah. Hal tersebut perlu diminimalisir oleh pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar permasalahan tingginya tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah dapat diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang memadai, sehingga tidak terjadinya penumpukan angkatan kerja yang tersedia.

Solusi yang dapat dijalankan guna mengurangi pengangguran adalah pemerintah sebagai garda terdepan sekuat tenaga untuk berupaya dan memberikan arahan sektor-sektor produksi, penanaman modal publik dan regulasi yang menuju pada ketersediaan lapangan pekerjaan. Peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seharusnya lebih pro pada rakyat yang menjadi pengangguran, maka dari itu, apa yang menjadi kepentingan oleh masyarakat yang sedang menganggur akan dijadikan prioritas dalam pembangunan ekonomi.⁷ Oleh sebab itu, apabila pertumbuhan ekonomi terjadi penurunan sedangkan tingkat pengangguran akan naik. Pertumbuhan ekonomi

⁶ Moh. Subhan, "Pengangguran Dan Tawaran Solutif Dalam Perspektif Islam," *JES: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2018): 153–64, <http://dx.doi.org/10.30736/jesa.v3i2.44>.

⁷ Mohammad Mulyadi, "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Dalam Masyarakat," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 21, no. 3 (2016): 221–36, <http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v21i3.776>.

dapat dihitung menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).⁸

Tabel 1.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2021 (Juta Rupiah)

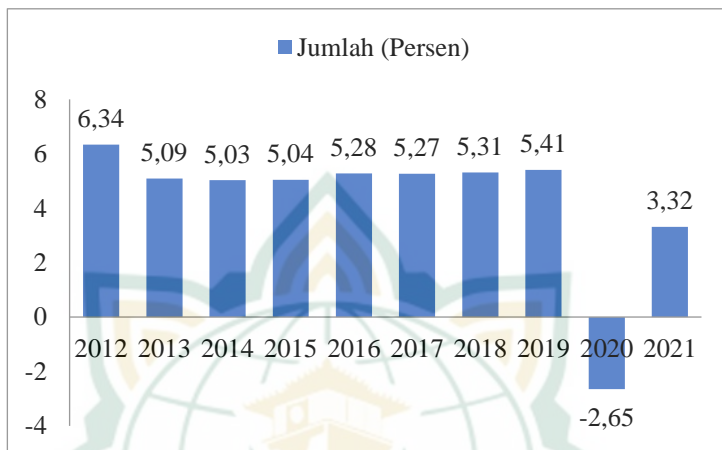
Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
2012	691.343.115,96
2013	726.655.118,06
2014	764.959.150,95
2015	806.765.092,17
2016	849.099.354,69
2017	893.750.296,17
2018	941.091.143,86
2019	991.225.709,06
2020	965.225.709,06
2021	997.317.097,26

Sumber : Data BPS Jateng

Pada Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa perkembangan nilai PDRB di Provinsi Jawa Tengah dan tingkat Pertumbuhan ekonominya terus terjadi kenaikan. Data nilai PDRB tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 941.091.143,86 juta rupiah kemudian pada tahun 2019 naik menjadi sebesar 991.516.543,31 juta rupiah. Pada periode 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 965.225.709,06 juta rupiah dan pada periode 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 997.317.097,26 juta rupiah. Kemudian pada peningkatan pertumbuhan ekonomi digambarkan pada Gambar 1.2 dibawah ini.

⁸ “Asumsi Dasar Ekonomi Makro,” Badan Kebijakan Fiskal, diakses pada 28 Oktober, 2022. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/08/19/16-asumsi-dasar-ekonomi-makro>.

Gambar 1.2 Grafik Angka Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (persen)



Sumber : Data BPS Jateng

Gambar angka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jateng pada periode 2017 dan 2018 bertumbuh dengan signifikan sebesar 5,27 menjadi 5,31 persen. Kemudian, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jateng pada periode 2019 yang semula naik menjadi 5,41 persen, selanjutnya pada periode 2020 terjadi penurunan hingga menjadi -2,65 persen. Pada periode 2020 berdampak pada permintaan dan penawaran barang maupun jasa di seluruh dunia hal ini disebabkan karena masyarakat mengurangi nilai konsumsi di kehidupan sehari-harinya.⁹ Sedangkan, di periode 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan sebesar 3,32 persen. Menurut Sadono Sukirno jika disuatu wilayah atau negara pertumbuhan ekonominya terjadi sebuah peningkatan, maka dinantikan bisa mempunyai pengaruh terhadap penurunan jumlah pengangguran.¹⁰

Hal tersebut diperkuat oleh adanya penelitian yang dilakukan oleh M. Amirul Muminin dan Wahyu Hidayat R. tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat

⁹ Yodie Hardiyana, "Pertumbuhan Ekonomi Minus, Apa Maksudnya Bagi Pekerja?," *Big Alpha*, 06 Agustus, 2020, <https://bigalpha.id/news/pertumbuhan-ekonomi-minus-apa-maksudnya-bagi-pekerja>.

¹⁰ Moh. Arif Novriansyah, "Pengaruh Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Gorontalo," *Gorontalo Development Review* 1, no. 1 (2018): 59–73, <https://doi.org/10.32662/golder.v1i1.115>.

Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2011 yang mana dampak dari penelitian tersebut ialah bahwa pada variabel Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap TPT, hal tersebut memberitahukan setiap adanya peristiwa peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar satu-satuan dapat disimpulkan TPT terjadi penurunan.¹¹

Berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Habel Taime dan Putri Nadya Djaelani yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Mimika yang mana dampak dari observasi tersebut menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran pada daerah Mimika. Terjadinya kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengurangi jumlah pengangguran pada wilayah tersebut.¹²

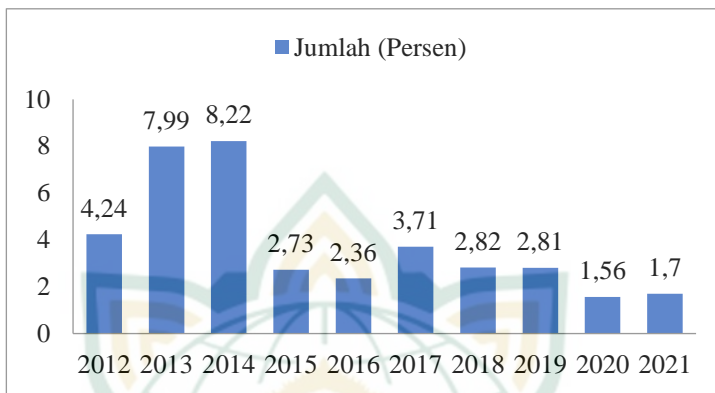
Apabila membahas tentang adanya pengangguran, inflasi tidak kalah penting sebagai peran pada perubahan jumlah angka pengangguran. Secara harfiah, inflasi mempunyai arti peningkatan tingkat harga secara agregat oleh barang atau komoditas maupun jasa selama periode waktu tertentu. Inflasi bisa diakui sebagai bagian dari peristiwa moneter yang mana disebabkan oleh turunnya nilai unit penghitungan moneter pada suatu barang.¹³

¹¹ M. Amirul Muminin dan Wahyu Hidayat R., "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 1, no. 3 (2017): 374–84, https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/download/6164/5619/16395&ved=2ahUKEwiP1rDk2M37AhUV4XMBHRDgDZYQFnoECAwQAQ&usq=AOvVaw3qq0QZMwdI_m8X-5obEIE7.

¹² Habel Taime dan Putri Nadya Djaelani, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Mimika," *Journal of Economics and Regional Science* 1, no. 1 (2021): 54–66, <https://doi.org/10.52421/jurnal-esensi.v1i1.137>.

¹³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 135.

Gambar 1.3 Perkembangan Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2021 (persen)



Sumber : Data BPS Jateng

Gambar 1.3 memperlihatkan tingkat inflasi di Provinsi Jateng yang mengalami penurunan dan kenaikan secara fluktuatif. BPS mencatat bahwa pada periode 2014 Provinsi Jateng terjadi inflasi yang tinggi daripada pada saat periode setelahnya. Inflasi pada periode 2020 adalah sebesar 1,56 persen, sedangkan pada periode 2021 tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah naik menjadi sebesar 1,70 persen. Penyebab utama inflasi di Jawa Tengah adalah kenaikan harga telur ayam ras, cabai rawit, dan minyak goreng.¹⁴ Semakin tinggi terjadinya peningkatan pengangguran maka akan menyebabkan rendahnya tingkat inflasi pada upah. Pada hal ini, pengangguran menjadi hasil dan mendefinisikan inflasi yang menjadi peristiwa berubahnya harga. Suatu keadaan dimana secara simultan tingkat pengangguran terus bertambah dan juga diiringi oleh inflasi yang terus naik pula maka diartikan sebagai *stagflasi*.¹⁵

¹⁴ Cun Cahaya, “Akhir Tahun 2021 Di Jateng Alami Inflasi 0,64 Persen,” SuaraMerdeka.com, diakses pada 28 Oktober, 2022. <https://www.google.com/amp/s/www.suaramerdeka.com/ekonomi/amp/pr-04231767/akhir-tahun-2021-di-jateng-alami-inflasi-064-persen>.

¹⁵ “Analisis Keberadaan Tradeoff Inflasi Dan Pengangguran (Kurva Phillips) Di Indonesia,” dpr.go.id, diakses pada 29 Oktober, 2022. https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_analisis_keberadaan_tradeoff_inflasi_dan_pengangguran_%28kurva_phillips%29_di_indonesia20140821142142.pdf.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Yuni Bintang dan Riandani Rezki Prana tentang Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Medan bahwa hasil dari penelitian tersebut memperlihatkan kondisi inflasi yang tidak mempunyai pengaruh pada TPT di Kota Medan tersebut.¹⁶

Penelitian tersebut tidak sejalan dengan yang dilaksanakan oleh Ismanto Hadi Santoso yang berjudul *The Effect of Inflation and Wages on Unemployment in East Java Province* hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh pada tingkat pengangguran secara positif di Provinsi Jatim. Pengamatan tersebut memanfaatkan data sekunder yang diterbitkan oleh BPS periode 2010-2014.¹⁷

Selain terjadinya inflasi, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) juga menyebabkan faktor yang memberikan pengaruh pada pengangguran di suatu wilayah. Hal tersebut dipaparkan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang memutuskan UM 2021 yang sama pada tahun 2020. Ditetapkannya Upah Minimum Provinsi pada tiap wilayah atau daerah menjadi hak setiap gubernur. Kemudian, hingga pada tanggal 3 November 2020, 25 provinsi telah menetapkan UMP 2021.¹⁸

Jika di suatu wilayah pertumbuhan ekonominya terjadi kenaikan, begitu pula dinantikan bisa berpengaruh terhadap terjadinya penurunan tingkat angka pengangguran, hal tersebut diiringi dengan adanya tingkat upah. Ketika tingkat upah pada suatu wilayah mengalami kenaikan, maka akan mempengaruhi terjadinya penurunan

¹⁶ Sri Yuni Bintang dan Riandani Rezki Prana, "Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Medan," *Civitas: Jurnal Studi Manajemen* 2, no. 2 (2020): 97–100, <https://journals.synthesispublication.org/index.php/civitas/article/view/156/142>.

¹⁷ Ismanto Hadi Santoso, "The Effect of Inflation and Wages on Unemployment in East Java Province," *International Journal of Economics and Finance Studies* 13, no. 2 (2021): 65–81, <https://sobiad.org/manuscript/index.php/ijefs/article/view/749/74>.

¹⁸ Dewi Restu Mangeswuri, "Dampak Penetapan Upah Minimum Provinsi 2021 Di Tengah Pandemi Covid-19," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 12, no. 21 (2020): 19–24, <http://sdip.dpr.go.id/search/index/category/jurnal/vars/YTozOntzOjU6InF1ZXJ5IjtzOjA6IiI7czo3OiJwcm9kdWN0IjtzOjA6IiI7czo4OiJjYXRIZ29yeSI7czo2OiJqdXJuYWwiO30%253D/page/34&ved=2ahUKEwixYyD3M37AhXWS2wGHZQCDNYQFnoECA0QAQ&usq=AOvVaw0ziItJd77dJKkGcakhcOFV>.

jumlah angka pengangguran pula.¹⁹ Para pekerja jika diberikan upah yang tidak layak atau sesuai standar yang mereka dapatkan akan cenderung memilih mengundurkan diri dari perusahaan tersebut dan peristiwa ini akan cenderung menimbulkan kenaikan angka pengangguran yang ada disuatu wilayah.

Peristiwa tersebut sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Rangga Pramudjasi. T, Juliansyah, dan Diana Lestari tentang Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendidikan Serta Upah Terhadap Pengangguran di Kabupaten Paser yang mana hasilnya memperlihatkan bahwa pada variabel Upah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Peristiwa ini mempunyai arti apabila upah naik, dapat memberikan penurunan terhadap tingkat pengangguran.²⁰

Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh R. Achmad Ryan. Z, Nanik Istiyani, dan Anifatul Hanim yang mempunyai judul tentang Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Regional Terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur yang hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa variabel UMR berpengaruh positif dan signifikan pada pengangguran terdidik di Jatim, akibat terjadinya kenaikan upah yang diberikan perusahaan bisa melakukan peningkatan pengangguran terdidik.²¹

Selanjutnya, kualitas SDM dan skala ekonomi dapat diukur dengan IPM. Salah satu indikator yang bisa digunakan guna

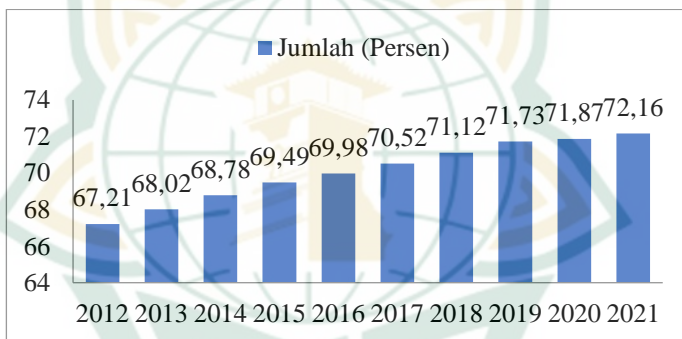
¹⁹ Rully Sutansyah Effendy, "Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengurangan Terbuka Di Indonesia," *Fokus Ekonomi Jurnal Ilmiah Ekonomi* 14, no. 1 (2019): 105–24, <https://doi.org/10.34152/fe.14.1.115-124>.

²⁰ Rangga Pramudjasi. T, Juliansyah, dan Diana Lestari, "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pendidikan Serta Upah Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Paser," *Jurnal Kinerja* 16, no. 1 (2019): 69–77, https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/download/5284/472&ved=2ahUKEwjc59HH3M37AhV4SmwGHb8fCQYQFnoECCAQAQ&usq=A0vVaw3qKL4F90t2Kz_j0ayfyyAJ.

²¹ R. Achmad Ryan, Nanik Istiyani, dan Anifatul Hanim, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Angkatan Kerja Dan Upah Minimum Regional Terhadap Pengangguran Terdidik Di Jawa Timur," *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akutansi* 4, no. 2 (2017): 187–91, https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/download/5284/472&ved=2ahUKEwjc59HH3M37AhV4SmwGHb8fCQYQFnoECCAQAQ&usq=A0vVaw3qKL4F90t2Kz_j0ayfyyAJ.

mengukur tingkat kesuksesan pembangunan mutu sumber daya manusia ialah dengan IPM itu sendiri. *United Nations Development Programme* (UNDP) pertama kalinya memberitahukan Indeks Pembangunan Manusia pada periode 1990. Kemudian, BPS melakukan perubahan terhadap IPM pada beberapa indikator yang sudah tidak selaras untuk dipergunakan dalam melakukan perhitungan IPM, yakni ialah Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita berganti Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita, Angka Melek Huruf yang diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah.²²

Gambar 1.4 Grafik Angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2021 (persen)



Sumber : Data BPS Jawa Tengah Dalam Angka, berbagai edisi

Pada Grafik 1.4 IPM pada periode 2020 di Provinsi Jawa Tengah masih mampu bertumbuh dengan positif yaitu sebesar 71,87 persen. Kemudian pada periode 2021 IPM di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan menjadi 72,16 persen. Terjadinya peningkatan IPM ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada semua dimensi, yakni dimensi umur panjang dan hidup sehat (UHH), dimensi standar hidup baik (pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan), dan dimensi pengetahuan (HLS dan RLS). Walaupun terjadinya kenaikan, tetapi angka IPM di Provinsi Jateng masih

²² Jahtu Widya Ningrum, Aziza Hanifa Khairunnisa, dan Nurul Huda, “Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia Tahun 2014-2018 Dalam Perspektif Islam,” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 212–22, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034>.

diposisi bawah IPM Nasional.²³ Pembangunan manusia yang dihitung dengan melalui besarnya suatu nilai IPM bisa berakibat pada rendahnya tingkat pengangguran di suatu negara atau daerah.²⁴

Hal ini sesuai pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfredo Y. Mahihody, Daisy S. M. Engka, dan Antonius Y. Luntungan yang berjudul Pengaruh Upah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengangguran di Kota Manado hasil penelitian pada indikator IPM menunjukkan bahwa memiliki pengaruh negatif yang signifikan pada Pengangguran di Kota Manado, maka dari itu bertambahnya IPM yang tinggi di kota tersebut, maka bisa mengalami penurunan terhadap tingkat pengangguran di Manado.²⁵

Berbeda dengan pengamatan yang dilaksanakan oleh Jeni Palindangan dan Abu Bakar yang mana penelitian tersebut tentang Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Mimika. Hasil dari penelitian tersebut pada variabel IPM mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan pada tingkat pengangguran yang disebabkan bertambah kualitasnya SDM baik dari sudut pendidikan, kesehatan maupun ekonomi menimbulkan tingkat persaingan antar seorang yang sedang mencari kerja semakin naik, kemudian disisi yang lain tidak tersedianya kuantitas lapangan pekerjaan yang memadai dan tentunya ini akan menimbulkan pengangguran di Kota Mimika.²⁶

²³ Musliman, "IPM Jawa Tengah 2021 Bertengger Di Angka 72,16," Jawa Pos [radarsemarang.id](https://www.google.com/amp/s/radarsemarang.id), Desember 09, 2021. <https://www.google.com/amp/s/radarsemarang.jawapos.com/artikel/opini/2021/12/09/ipm-jawa-tengah-2021-bertengger-di-angka-7216/%3Famp>.

²⁴ Dwi Mahroji dan Iin Nurkhasanah, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten," *JEQu: Jurnal Ekonomi-Qu (Jurnal Ilmu Ekonomi)* 9, no. 1 (2019): 51–72, <http://dx.doi.org/10.35448/jequ.v9i1.5436>.

²⁵ Alfredo Y. Mahihody, Daisy S. M. Engka, dan Antonius Y. Luntungan, "Pengaruh Upah Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengangguran Di Kota Manado," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18, no. 3 (2018): 24–34, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/20253/19860>.

²⁶ Jeni Palindangan dan Abu Bakar, "Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Mimika," *Jurnal Kritis* 5, no. 1 (2021): 65–80, <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/149/106>.

Berdasarkan pengamatan diatas, peneliti ingin melaksanakan penelitian lebih lanjut pada aspek yang digunakan yaitu, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengangguran yang akan dimasukkan sudut pandang syariah didalamnya. Terjadinya pengangguran karena disebabkan oleh sedikitnya lapangan pekerjaan yang baru dibandingkan pertumbuhan pencari kerja yang baru. Ketika permasalahan inflasi dapat dikendalikan, pertumbuhan ekonomi mempunyai kualitas yang baik, kemudian upah minimum regional layak untuk diterima dan didapatkan oleh para pekerja, dan IPM melahirkan SDM yang berkualitas dan menuju kemaslahatan. Maka pengangguran yang terjadi di suatu wilayah atau daerah akan dapat teratasi, kemudian pemerintah dan rakyat kehidupannya akan sama-sama sejahtera.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2021?
2. Apakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2021?
3. Apakah pengaruh UMK terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2021?
4. Apakah pengaruh IPM terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2021?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2021.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2021.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh UMK terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2021.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh IPM terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2021.

D. Manfaat Penelitian

Pengamatan ini manfaatnya terbagi menjadi dua, yaitu penjelasannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat praktis menjelaskan kebermanfaatannya suatu hasil penelitian yang diwujudkan dengan sumbangan pemikiran, memperkaya konsep maupun teori, dan pemecahan masalah agar mencapai kesejahteraan umat manusia yang sejalan dengan pedoman Al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini berkaitan dengan ekonomi Islam dan ekonomi moneter khususnya tentang pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pengangguran terbuka yang ada di Provinsi Jateng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Harapan dari penulis adalah agar dilakukannya pengamatan ini bermanfaat bagi pemerintah daerah Jawa Tengah, yaitu sebagai masukan tentang pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pengangguran terbuka yang ada di Provinsi Jawa Tengah sehingga didalam pengambilan kebijakan agar lebih mempertimbangkan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

b. Bagi penulis

Pengamatan ini dinantikan bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis, serta mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.

E. Sistematika Penulisan

Urut-urutan penulisan dimaksud guna memberikan kemudahan dalam memahami isi dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal dalam penelitian ini berisikan halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, pengesahan majelis ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto,

persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dan bab lainnya saling berhubungan dikarenakan kelima bab tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang uraian teori dari variabel pendukung penelitian, dilengkapi dengan hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir serta hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, desain dan definisi operasional variabel, uji asumsi klasik, teknik pengumpulan data serta teknik analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi hasil penelitian yaitu gambaran objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran.

3. Bagian akhir

Bagian ini berisikan daftar pustaka yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran.